

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif bagi pencapaian aspirasi setiap warga. Dengan kata lain pembangunan adalah proses memanusiakan manusia. Menurut Todaro, pembangunan harus dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan pendidikan (dalam Rustiadi, 2011).

Tujuan pokok dari pembangunan itu adalah pembangunan wilayah-wilayah yang ada didalamnya terutama dalam keserasian perkembangan atau laju pertumbuhan antar wilayah. Faktor-faktor pendorong perkembangan suatu wilayah sangat berkaitan erat dengan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah khususnya sarana dan prasarana sosial ekonomi yang berperan dalam memajukan serta pemerataan pembangunan wilayah. Tidak meratanya persebaran fasilitas publik tersebut akan menimbulkan disparitas antar wilayah sehingga suatu wilayah dapat dikatakan tertinggal atau wilayah miskin. Pusat pengembangan suatu wilayah umumnya juga berfungsi sebagai pusat pelayanan harus mempunyai sarana yang mampu memberikan pelayanan sebagai wilayah di belakangnya.

Menurut Anwar, Konsep pembangunan yang mengarahkan pembangunan wilayah kepada terjadinya pemerataan (*equity*) yang mendukung pertumbuhan ekonomi (*efficiency*), dan berkelanjutan (*sustainability*) (dalam Rustiadi, 2011). Pembangunan diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara atau wilayah untuk mengembangkan kualitas hidup masyarakatnya. Jadi pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses dimana terdapat saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkembangan tersebut.

Sejalan dengan undang-undang no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka pemerintah daerah sangat berperan dalam perencanaan dan pengembangan wilayah. Serta berupaya untuk mengurangi terjadinya ketimpangan perkembangan wilayah. Perkembangan pada tingkat daerah perlu diarahkan untuk mendorong wilayah agar tumbuh secara mandiri berdasarkan potensi sosial ekonomi dan karakteristik spesifik wilayah yang dimiliki.

Pengembangan wilayah merupakan suatu cara pendekatan dalam menelaah segala aspek sosial, politik, dan ekonomi dalam kaitannya dengan penataan ruang dan wilayah sebagai wadah terpadunya program-program dan proyek-proyek sektor pembangunan yang diperlukan dari skala makro dan mikro. Analisis mengenai disparitas tingkat perkembangan wilayah penting untuk mengetahui perkembangan pelayanan, terutama dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas pelayanan sehingga perlu usaha untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan wilayah.

Beberapa hasil penelitian dengan menggunakan formula Williamson (1968) yaitu indeks Ketimpangan Regional (*Regional Inequality*). Nilai indeks merentang antara 0 (merata sempurna) hingga 1 (sangat tidak merata), dimana: Semakin indeks ketimpangan mendekati 0 berarti tingkat ketimpangan kecil atau tidak ada kesenjangan ekonomi antar daerah. Indeks lebih besar dari 0 menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi antar daerah.

Kondisi ketimpangan antar wilayah terjadi di Jawa Tengah, yaitu antara Kabupaten/Kota yang satu dengan yang lain. Ketimpangan antar wilayah di Jawa Tengah dapat dibuktikan dengan perhitungan tingkat ketimpangan antar wilayah menggunakan analisa Williamson Indeks. Perubahan indeks dari tahun 1985-2005 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Indeks Ketimpangan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 1985-2005

Tahun	1985	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Indeks	0,47	0,61	0,78	0,78	0,76	0,77	0,80	0,76	0,76

Sumber : (Hartono 2008)

Penelitian akan dilakukan di Kabupaten Boyolali, Kabupaten boyolali memiliki 19 Kecamatan yaitu: Kecamatan Ampel, Musuk, Cepogo, Selo, Boyolali, Mojosongo, Sawit, Banyudono, Teras, Sambu, Ngemplak, Klego, Karanggede, Nogosari, Andong, Kemusu, Wonosegoro, Kemusu dan Juwangi. Sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Boyolali tahun 2011-2031 telah mengarahkan bahwa untuk pemerataan pembangunan wilayah maka dibentuk fungsi pusat pelayanan dan wilayah pengembangan di Kabupaten Boyolali yaitu sebagai berikut :

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi Kecamatan Boyolali.
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi kecamatan Ampel.
3. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), meliputi Mojosongo, Banyudono, Simo, Karanggede.
4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), meliputi kecamatan Teras, Sambu, Ngemplak.
5. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), meliputi kecamatan Selo, Cepogo, Musuk, Sawit, Nogosari, Klego, Andong, Kemusu, Wonosegoro, Juwangi.

Meskipun secara konseptual telah di bentuk perencanaan pengembangan untuk pemerataan perkembangan wilayah. Namun dalam kenyataannya disparitas perkembangan wilayah antar kecamatan di Kabupaten Boyolali masih tetap terjadi. Terutama terkonsentrasinya fasilitas-fasilitas pelayanan di pusat kota menjadikan daerah pusat semakin dipadati penduduk yang menuntut lebih banyak lagi fasilitas pelayanan sosial. Kebutuhan penduduk di luar pusat kota yang belum terpenuhi mendorong arus penduduk menuju ke pusat-pusat pelayanan, yaitu di pusat kota.

Kesenjangan atau tidak meratanya perkembangan wilayah di kabupaten Boyolali ditandai dengan terserap dan terkonsentrasinya penduduk di pusat kabupaten, diketahui dari tingkat kepadatan penduduk Tahun 2011 tertinggi berada di Kecamatan Boyolali yaitu 2.282 jiwa/km² dimana Kecamatan Boyolali yang juga menjadi pusat Kota. Sedangkan untuk Kecamatan Sawit 1912 jiwa/km², Kecamatan Ngemplak 1863 jiwa/km², Kecamatan Banyudono 1.775 jiwa/km² dan Kecamatan Teras 1544 jiwa/km². Selain Kecamatan-Kecamatan tersebut kepadatan penduduk berkisar antara 439-1188 jiwa/ km², untuk lebih lengkapnya disajikan dalam tabel 1.2

Kesenjangan kedua tampak dari PDRB perkapita masing-masing kecamatan di Kabupaten Boyolali pada tabel 1.3. Dimana nilai PDRB perkapita yang tertinggi adalah Kecamatan Banyudono sebesar Rp 18.056.373,04, selanjutnya Kecamatan Teras Rp 15.426.752,15, Kecamatan Boyolali Rp 12.157.318,59, Kecamatan Simo Rp 10.585.581,14, Kecamatan Sawit Rp 10.560.587,22 sedangkan Kecamatan yang lainnya berkisar Rp 10.178.988,42- Rp 6.726.427,77.

Kesenjangan yang ke tiga yaitu tidak meratanya persebaran fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan, serta fasilitas perekonomian pada tabel 1.4 tabel 1.5 dan tabel 1.6. Persebaran dari fasilitas-fasilitas tersebut lebih terkonsentrasi di pusat kabupaten yaitu kecamatan Boyolali serta kecamatan yang berdekatan dengan pusat kabupaten. Hal tersebut mendorong penduduk untuk lebih memilih ke pusat Kabupaten untuk melakukan kegiatannya.

Tabel 1.2 Kepadatan Penduduk Kabupaten Boyolali tahun 2011

no	kecamatan	luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Selo	56,0780	27092	483
2	Ampel	90,3912	68977	763
3	Cepogo	52,9980	53581	1011
4	Musuk	65,0414	61096	939
5	Boyolali	26,2510	59938	2283
6	Mojosongo	43,4116	51591	1188
7	Teras	29,9363	46236	1544
8	Sawit	17,2318	32945	1912
9	Banyudono	25,3794	45036	1775
10	Sambi	46,4949	48171	1048
11	Ngemplak	38,5270	71769	1863
12	Nogosari	55,0843	61253	1112
13	Simo	48,0403	43566	907
14	Karanggede	41,7561	40530	971
15	Klego	51,8773	46096	889
16	Andong	54,5278	61808	1134
17	Kemusu	99,0842	46532	470
18	Wonosegoro	92,9979	54944	591
19	Juwangi	79,9935	35143	439

Sumber : Boyolali dalam angka 2011

Tabel 1.3 PDRB Perkapita Kabupaten Boyolali tahun 2011

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	PDRB perkapita (Rupiah)
1	Selo	27092	9.348.090,84
2	Ampel	68977	9.584.680,52
3	Cepogo	53581	9.780.237,88
4	Musuk	61096	8.357.318,18
5	Boyolali	59938	12.157.318,59
6	Mojosongo	51591	8.652.731,68
7	Teras	46236	15.426.752,15
8	Sawit	32945	10.560.587,22
9	Banyudono	45036	18.056.373,04
10	Sambi	48171	8.402.612,61
11	Ngemplak	71769	6.726.427,77
12	Nogosari	61253	8.241.000,98
13	Simo	43566	10.585.581,14
14	Karanggede	40530	10.178.988,42
15	Klego	46096	7.956.295,66
16	Andong	61808	7.175.287,08
17	Kemusu	46532	6.484.246,55
18	Wonosegoro	54944	7.470.025,23
19	Juwangi	35143	7.120.303,54

Sumber : Boyolali dalam angka 2011

Tabel 1.4 Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Boyolali tahun 2011

no	kecamatan	Jumlah Penduduk	Jenis fasilitas			
			TK	SD	SMP	SMA
1	Selo	27092	17	23	3	1
2	Ampel	68977	38	54	11	6
3	Cepogo	53581	36	47	5	4
4	Musuk	61096	39	50	5	1
5	Boyolali	59938	53	42	10	12
6	Mojosongo	51591	27	42	5	3
7	Teras	46236	27	33	4	4
8	Sawit	32945	22	27	3	2
9	Banyudono	45036	34	38	7	2
10	Sambi	48171	27	48	7	4
11	Ngemplak	71769	42	49	8	1
12	Nogosari	61253	39	52	8	3
13	Simo	43566	19	54	9	12
14	Karanggede	40530	20	43	9	6
15	Klego	46096	21	45	8	3
16	Andong	61808	24	54	9	9
17	Kemusu	46532	14	36	6	2
18	Wonosegoro	54944	32	45	10	5
19	Juwangi	35143	18	28	6	2

Sumber : Boyolali dalam angka 2011

Tabel 1.5 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Boyolali tahun 2011

no	kecamatan	jenis fasilitas			
		RS, RB, Poliklinik	puskesmas	puspemb	tempat praktek Dr/Drg
1	Selo	0	2	2	2
2	Ampel	0	3	2	19
3	Cepogo	2	2	2	11
4	Musuk	0	3	3	5
5	Boyolali	8	3	2	85
6	Mojosongo	2	1	3	16
7	Teras	0	1	3	10
8	Sawit	3	3	3	34
9	Banyudono	3	2	1	22
10	Sambi	1	2	1	14
11	Ngemplak	3	2	1	34
12	Nogosari	0	2	2	19
13	Simo	3	1	2	20
14	Karanggede	4	2	2	21
15	Klego	2	3	3	16
16	Andong	0	2	3	8
17	Kemusu	0	3	5	8
18	Wonosegoro	0	4	1	10
19	Juwangi	4	2	3	11

Sumber : Boyolali dalam angka tahun 2011

Tabel 1.6 Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Boyolali tahun 2011

No	kecamatan	Jumlah Penduduk	jenis fasilitas	
			pasar	toko/warung/kios
1	Selo	27092	3	275
2	Ampel	68977	4	535
3	Cepogo	53581	4	509
4	Musuk	61096	7	508
5	Boyolali	59938	6	931
6	Mojosongo	51591	7	784
7	Teras	46236	4	548
8	Sawit	32945	2	378
9	Banyudono	45036	6	498
10	Sambi	48171	5	322
11	Ngemplak	71769	5	929
12	Nogosari	61253	3	947
13	Simo	43566	4	329
14	Karanggede	40530	6	717
15	Klego	46096	4	407
16	Andong	61808	10	574
17	Kemus	46532	7	517
18	Wonosegoro	54944	11	293
19	Juwangi	35143	4	103

Sumber : Boyolali dalam angka tahun 2011

Dari berbagai uraian latar belakang masalah dan diperkuat dengan data-data pendukung, maka Kabupaten Boyolali membutuhkan pemerataan serta perencanaan pengembangan wilayah untuk setiap wilayah. Sehingga peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS DISPARITAS PERKEMBANGAN WILAYAH ANTAR FUNGSI PUSAT PELAYANAN DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 DAN 2011.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan wilayah antar Fungsi Pusat Pelayanan di Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana disparitas perkembangan wilayah antar Satuan Fungsi Pusat Pelayanan di kabupaten Boyolali?
3. Faktor apa yang dominan mempengaruhi perkembangan wilayah di Kabupaten Boyolali?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perkembangan wilayah antar Fungsi Pusat Pelayanan di Kabupaten Boyolali.
2. Mengetahui disparitas perkembangan wilayah antar Fungsi Pusat Pelayanan di kabupaten Boyolali.
3. Mengetahui faktor yang dominan mempengaruhi perkembangan wilayah di Kabupaten Boyolali.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai syarat untuk memenuhi derajat Sarjana Strata 1 pada Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Boyolali sebagai bahan referensi lebih lanjut mengenai perencanaan perkembangan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Boyolali.
3. Sebagai pertimbangan dan referensi bagi penelitian-penelitian geografi berikutnya.

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1 Geografi

Menurut Bintarto (1997), Geografi merupakan ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan, keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Obyek material pertama adalah kaitannya dengan beberapa aspek kehidupan manusia (lingkungan, dan aspek pembangunan, sedang objek material tersebut dari segi keruangan yang meliputi pola sistem dan proses.

Menurut Yunus (2008), terdapat tiga pendekatan utama geografi yaitu pendekatan keruangan (*spatial approach*), pendekatan ekologi (*ecological approach*) dan pendekatan kompleks wilayah (*regional complex approach*).

1. Pendekatan keruangan (*spatial approach*)

Ruang dapat diartikan sebagai bagian tertentu dari permukaan bumi yang mampu mengakomodasikan berbagai bentuk kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya. Dengan demikian pendekatan keruangan merupakan suatu metode untuk memahami gejala tertentu agar mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam melalui media ruang yang dalam hal ini variabel ruang mendapat posisi utama dalam setiap analisis. Menurut Goodall (dalam Yunus, 2010) pendekatan keruangan diartikan sebagai suatu metode analisis yang menekankan pada variabel ruang. Terdapat 9 tema analisis dalam pendekatan keruangan, yaitu :

- a. Analisis pola keruangan (*spatial pattern analysis*)

Analisis pola keruangan merupakan kekhasan sebaran keruangan gejala geosfer di permukaan bumi. Oleh karena itu gejala keruangan sendiri terdiri dari elemen-elemen pembentuk ruang yang dapat diabstraksikan menjadi bentuk titik, garis, atau area maka pola keruangan selalu berkisar pada kekhasan sebaran titik-titik, garis-garis, atau area-area.

- b. Analisis struktur keruangan (*spatial structure analysis*)

Analisis struktur keruangan merupakan upaya menganalisis ruang berupa gejala geosfer yang meliputi gejala fisik dan gejala non fisik atas dasar strukturnya. Maka dalam analisis struktur keruangan pokok pembahasan lebih menekankan pada komposisi gejala yang ada dalam ruang (wadah).

c. Analisis proses keruangan (*spatial process analysis*)

Analisis proses keruangan merupakan upaya yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi secara terus-menerus dalam rentetan peristiwa atau suatu perubahan secara bertahap dan berlangsung terus menerus menuju ke hasil akhir yang ingin dicapai. Sehingga setiap analisis proses keruangan harus mempunyai periode waktu yang dapat digunakan sebagai dasar analisis.

d. Analisis interaksi keruangan (*spatial interaction analysis*)

Analisis interaksi keruangan merupakan proses saling mempengaruhi antar dua hal dalam suatu ruang. Terdapat beberapa bentuk interaksi dalam ruang yaitu : 1) *balanced interaction* yang bersifat kurang solid mengenai intensitas interaksinya. 2) *imbalanced interaction* yang bersifat lebih solid dari tipe pertama mengenai intensitas hubungannya. 3) *solid interaction* merupakan interaksi yang solid.

e. Analisis organisasi keruangan (*spatial organization/spatial system analysis*)

Analisis organisasi keruangan merupakan interaksi antara elemen-elemen lingkungan dengan karakteristik tatanan sebaran elemen pembentuk ruang (gejala geosfer).

f. Analisis asosiasi keruangan (*spatial association analysis*)

Analisis asosiasi keruangan merupakan upaya untuk mengetahui ketekaitan korelasi antar gejala tertentu dengan gejala yang lainnya. Tujuan utama dari analisis asosiasi keruangan adalah untuk mengetahui apakah sebaran gejala tertentu berkorelasi dengan sebaran gejala yang lain. Korelasi keruangan yang dapat diungkap dapat bertolak ukur dari pola keruangan, struktur keruangan, proses keruangan, interaksi keruangan dan lain sebagainya.

g. Analisis komparasi keruangan (*spatial comparison analysis*)

Analisis komparasi keruangan merupakan upaya untuk komparasi atau membandingkan wilayah satu dengan wilayah yang lainnya, maka minimal harus ada dua wilayah sebagai dasar analisis. Tujuan dari analisis komparasi keruangan merupakan upaya untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan yang ada pada masing-masing wilayah dalam hal yang sama sehingga dapat digunakan untuk menentukan kebijakan pengembangan wilayah untuk lebih lanjut.

h. Analisis kecenderungan keruangan (*spatial tendency trend analysis*)

Analisis kecenderungan keruangan merupakan lanjutan dari analisis proses keruangan yang dapat mendasarkan pola, struktur, dan asosiasi. Analisis kecenderungan spasial mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan wilayah, karena orientasi analisisnya diarahkan untuk mampu menjangkau periode waktu yang akan datang.

i. Analisis sinergisme keruangan (*spatial synergism analysis*)

Analisis sinergisme keruangan merupakan usaha untuk mengenali wilayah-wilayah mana dan sektor-sektor apa yang layak untuk melakukan kerjasama regional dalam rangka memperoleh kinerja pembangunan wilayah yang jauh lebih baik dibandingkan dengan apabila wilayah tersebut bekerja sendiri.

2. Pendekatan ekologi (*ecological approach*)

Pendekatan ekologi merupakan upaya dalam mengkaji fenomena geosfer khususnya terhadap interaksi antara organisme hidup dengan lingkungannya. Secara garis besar ada 4 tema analisis yang dikembangkan dalam pendekatan ekologi di bidang kajian geografi yaitu:

a. Tema analisis manusia dengan lingkungan (*man and environment analysis*)

Tema analisis manusia dengan lingkungan yang menjadi penekanan adalah perilaku (*behavior*) manusia. Perilaku manusia sendiri terkait dengan berbagai hal antara lain persepsi, preferensi, dan aksi menentukan sesuatu sejenisnya dan terciptanya perilaku sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor.

- b. Tema analisis kegiatan manusia dengan lingkungan (*human activity and environment analysis*)

Tema analisis kegiatan manusia dengan lingkungan menekankan pada kegiatan manusia maka fokus perhatian terletak pada kinerja (*performance*) kegiatan manusia tersebut yang dalam hal ini dapat dinilai dari segi jumlah produksinya, produktivitasnya, kualitas produksinya, sistem pemasarannya, proses produksinya dan aspek lainnya yang berkaitan dengan kinerja kegiatan. Analisis ini bertujuan untuk mengungkapkan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan dengan elemen lingkungannya.

- c. Tema analisis kenampakan fisik alami dengan lingkungan (*physio-natural features and environment analysis*)

Tema analisis keterkaitan antara kemampuan fisik alami dengan lingkungan dalam hal ini menempatkan kenampakan fisik alami menjadi fokus sentral. Performa atau kinerja kenampakan fisik alami yang menjadi tekanan dalam hal ini dapat mengacu pada kualitas gejala maupun kuantitas gejala. Kinerja kenampakan fisik alami juga selalu mengalami perubahan, walaupun perubahannya relatif mengalami waktu yang lama dibandingkan dengan kenampakan fisik budayawi.

- d. Tema analisis kenampakan fisik budaya dengan lingkungan (*physico-artificial and environment analysis*).

Tema analisis kenampakan fisik budaya dengan lingkungan, dimana kenampakan fisik atau budaya menjadi fokus sentral. Kenampakan fisik budaya sendiri diartikan sebagai suatu bangunan atau bentukan tertentu (bukan bangunan) yang keberadaannya secara sengaja dihadirkan oleh manusia untuk dimanfaatkan sebagai sarana atau prasarana penyelenggaraan kehidupannya.

3. Pendekatan kompleks wilayah (*regional complex approach*)

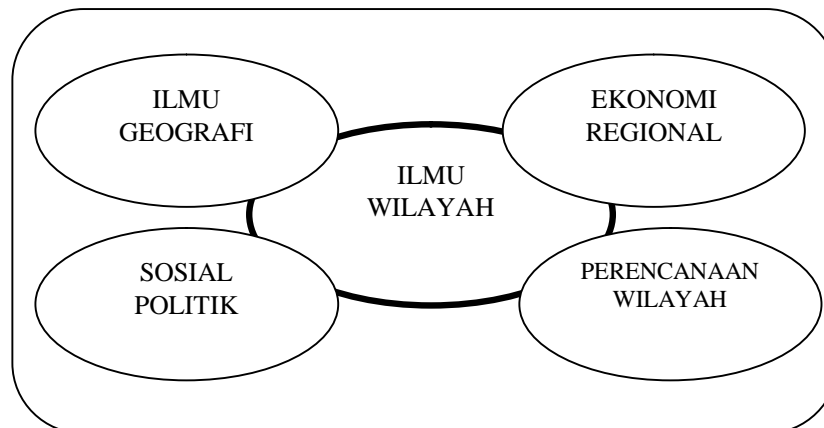
Pendekatan kompleks wilayah merupakan integrasi dari pendekatan keruangan dan pendekatan ekologis, yang mengkaji bahwa fenomena geografi yang terjadi di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga perbedaan ini membentuk karakteristik wilayah.

Dalam penelitian ini akan lebih menekankan Pendekatan Keruangan. Ullman mengemukakan *spatial interaction emphasizes the interdependence of areas and implies the movement of commodities, goods, people, information etc. between areas* (dalam, Muta'ali 2011). Sesuai dengan judul penelitian yaitu untuk mengetahui perkembangan wilayah dan mengetahui ketimpangan perkembangan wilayah. Maka peneliti menggunakan tema analisis proses keruangan dalam penelitian ini. Karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan wilayah dan disparitas wilayah di Kabupaten Boyolali dengan menggunakan data secara terus-menerus yaitu tahun 2002 dan tahun 2011, sehingga dari data pada tahun tersebut dapat dijadikan sebagai dasar analisis untuk mengetahui perkembangan dan ketimpangan wilayah di Kabupaten Boyolali

1.5.2 Pengertian Wilayah

Ilmu wilayah merupakan ilmu interdisipliner meliputi geografi, ekonomi *regional*, sosial politik, dan perencanaan wilayah atau lebih lengkapnya pada gambar berikut.

Gambar 1.1 Ilmu wilayah dan beberapa ilmu penunjangnya



Sumber : Muta'ali (2011)

Menurut Sutami (1977) dalam Muta'ali, ilmu wilayah mempelajari wilayah tertentu sebagai sistem, khususnya yang menyangkut hubungan interaksi dan interdependensi antara subsistem utama *ecosystem* dengan subsistem utama *social system*, serta kaitannya dengan wilayah-wilayah lainnya dalam membentuk suatu kesatuan wilayah guna pengembangan, termasuk penjagaan pelestarian wilayah tersebut.

Menurut Isard (1975) dalam Rustiadi, Wilayah merupakan Suatu area yang memiliki arti (*meaningful*), karena adanya masalah-masalah yang ada di dalamnya, khususnya masalah yang menyangkut sosial-ekonomi. (wilayah bukan sekedar areal dengan batas-batas tertentu). Menurut Undang-undang No. 26/2007 tentang penataan Ruang pengertian Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

Konsep wilayah klasik (Richardson,1969; Hagget,Cliff dan Frey,1977) dalam Rustiadi mengenai tipologi wilayah, membagi wilayah dalam tiga kategori:

1. Wilayah homogen (*uniform* atau *homogeneous region*)

Konsep Homogenitas menyatakan bahwa suatu wilayah terbentuk oleh adanya suatu kesamaan, baik kesamaan topografi, kesamaan dalam ras, agama, suku bangsa, atau kesamaan dalam bentuk lainnya.

2. Wilayah nodal

Menurut konsep Nodalitas, suatu wilayah dapat tumbuh oleh adanya suatu keterpusatan dalam wilayah tersebut, dimana di dalam wilayah tersebut terdapat pusat-pusat yang saling berinteraksi setiap hari dan berada dalam pengaruh suatu pusat utama.

3. Wilayah perencanaan (*planning region* atau *programming region*).

menurut konsep wilayah perencanaan, suatu wilayah dapat terbentuk dengan adanya kesatuan dalam perencanaan. Dengan demikian pengembangan wilayah merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana suatu wilayah dapat tumbuh dan berkembang menuju kondisi yang lebih baik. Kondisi yang lebih baik ini dilihat dari sudut pandang ekonomi, fisik, maupun dari sudut lingkungan hidup.

1.5.3 Pewilayahan atau *Regionalisasi*

Regionalisasi atau sering dikenal dengan istilah pewilayahan merupakan suatu proses atau usaha untuk membagi permukaan bumi atau bagian permukaan bumi tersebut untuk tinjauan tertentu. Secara Permukaan bumi akan terbagi-bagi atas berbagai wilayah sesuai dengan konsep wilayahnya. Perbedaan konsep yang diterapkan menghasilkan perbedaan unit-unit atau batas-batas wilayah yang dihasilkan. Singkat pewilayahan merupakan usaha untuk mendeliniasi atau memberi batas keruangan suatu wilayah.

Didalam proses-proses pewilayahan, kesatuan atau kesinambungan hamparan adalah sangat dikehendaki. Sebaliknya kecenderungan-kecenderungan fragmentasi spasial perlu dihindari. Wilayah-wilayah yang berkesinambungan secara spasial (*spatially contiguous*) akan mempermudah pengelolaan, sebaliknya wilayah-wilayah yang terfragmen (*spatially fragmented*) akan menciptakan berbagai inefisiensi. Pewilayahan digunakan sebagai alat untuk mengelola dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan.

Pewilayahan di Indonesia berhubungan erat dengan pemerataan pembangunan dan mendasarkan pembagian pada sumberdaya lokal sehingga prioritas pembangunan dapat dirancang dan dikelola sebaik-baiknya.

Pewilayahan untuk perencanaan pengembangan wilayah di Indonesia bertujuan untuk:

1. Menyebar-ratakan pembangunan, untuk menghindari pemusatan kegiatan pembangunan di daerah tertentu.
2. Menjamin keserasian dan koordinasi antar berbagai kegiatan pembangunan di tiap daerah.
3. Memberikan pengarahan kegiatan pembangunan untuk pemerintah, swasta maupun masyarakat umum (Hariry Hadi 1974 dalam Rustiadi).

Prinsip-prinsip pewilayahan, secara garis besar digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Penyebaran Wilayah (*Regional Generalization*)

Merupakan suatu proses atau usaha untuk membagi permukaan bumi atau bagian dari permukaan bumi tertentu menjadi beberapa bagian dengan cara mengubah atau menghilangkan faktor-faktor tertentu dalam populasi yang dianggap kurang penting atau kurang relevan, dengan maksud untuk menonjolkan karakter tertentu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam generalisasi regional adalah:

- a. Skala Peta

Studi wilayah yang detail menghendaki ketelitian dan ketepatan pengukuran-pengukuran yang dilakukan di lapangan. Akibat yang timbul dari penggunaan skala peta yang berbeda adalah, (1) semakin besar skala peta (semakin detail feature yang diamati) akan makin kecil derajat penyebarannya wilayah yang dilakukan. (2) Semakin kecil skala peta akan semakin besar derajat penyebarannya wilayah yang dilakukan (James, 1952)

- b. Tujuan Pewilayahan

Tujuan pewilayahan akan mempengaruhi derajat generalisasi yang dilakukan

2. Klasifikasi Wilayah

Merupakan usaha untuk mengadakan penggolongan wilayah secara sistematis kedalam bagian-bagian tertentu berdasarkan properti tertentu. Penggolongan yang dimaksud haruslah memperhatikan keseragaman sifat dan semua individu. Cara klasifikasi dapat dikerjakan dengan sifat kualitatif maupun kuantitatif.

1.5.4 Teori Perkembangan Wilayah

Dalam perkembangan wilayah dikenal berbagai teori-teori, antara lain sebagai berikut :

- a. **Josef Zaremba**, Dalam karyanya yang berjudul “*Regional planning inponland: Theory,Methods and Result*” bahwa studi pengembangan wilayah pada mulanya hanya merupakan kajian untuk membantu pemecahan masalah pembangunan fisik kota. Namun studi ini berkembang menjadi suatu studi tersendiri sebagai perencanaan fisik dalam lingkup yang lebih luas. Karena disadari pembangunan kota tidak dapat diisolasi dari lingkungan sekitarnya, artinya perencanaan kota harus pula dikaitkan dengan keadaan sosial-ekonomi dan aspek fisik pada daerah-daerah sekitarnya yang memiliki korelasi kuat. (dalam, Muta’ali, 2011)

- b. **Christaller**, dengan *Teori Central place* Mengemukakan Teori ini biasa disebut “tempat-tempat pemusatan”, kelengkapan dan fasilitas pelayanan ini akan membentuk hierarki pelayanan, dari hierarki pelayanan terkecil sampai hierarki pelayanan tertinggi. Teori tempat-tempat pemusatan dalam kaitannya dengan pembangunan wilayah merupakan kunci keberhasilan pertumbuhan ekonomi adalah terciptanya saling hubungan timbal-balik antara daerah perkotaan-perdesaan. Hubungan ini akan timbul dari interaksi antara hierarki tempat-tempat pemusatan yang akan menciptakan sistem pertukaran yang saling berhubungan dan mengefisiensikan penggunaan fasilitas dan prasarana pelayanan. (dalam, Muta’ali, 2011)

Adapun kegunaan teori tempat-tempat pemusatan dalam pengembangan dan pembangunan regional adalah:

- 1) Dapat digunakan untuk memahami struktur ruang pewilayahan.
- 2) Pada dasarnya teori tempat-tempat pemusatan berlaku umum, dimana pun akan tetap sama, yang mungkin berbeda adalah jarak tiap kota, besar kota dengan jumlah penduduknya ataupun kualitas jasa-jasa yang ada.
- 3) Dapat digunakan untuk model perencanaan dengan salah satu alasan, adalah adanya jaringan yang kuat yang mempunyai arti bahwa perencanaan suatu daerah harus memperhatikan implikasi terhadap daerah sekitarnya.
- 4) Dapat digunakan untuk mendefinisikan konsep-konsep yang sangat penting bagi perencanaan regional, seperti interdependensi kota dan desa, hierarki fungsi pusat, lingkup pasar dan penduduk ambang.

c. Francois Perroux, dalam *Teori Growth Pole Model* Menekankan pada pertumbuhan ekonomi terutama sektor perusahaan dan industri yang melihat adanya keterkaitan antara berbagai sektor-sektor ekonomi tersebut dalam suatu wilayah. Konsep Perroux juga lebih menekankan kepada pola geografis ataupun kepada implikasi geografis dari pertumbuhan ekonomi serta pergeseran antar atau intra industri. Jadi suatu pusat kutub-kitub yang menimbulkan daya sentrifugal ke luar pusat yang menyebabkan terjadinya daya sentripetal ke dalam pusat. Sebuah kutub merupakan pusat dari pusat-pusat lainnya yang sama besarnya atau lebih kecil. (dalam Muta'ali, 2011)

d. Myrdal, dalam *Teori Sebab Akibat Kumulatif* Semakin besar atau semakin kecil kesenjangan wilayah dipengaruhi oleh dua kekuatan yaitu *spread effect* dan *backwash effect*. Pembangunan di daerah maju akan menciptakan beberapa keadaan yang menimbulkan hambatan yang lebih besar kepada daerah-daerah yang terbelakang untuk berkembang. Faktor

ini disebut efek balik (*backwash effect*), yang berasal dari corak perpindahan penduduk dari daerah miskin ke daerah maju. Sedangkan perkembangan di daerah maju juga menimbulkan keadaan-keadaan yang mendorong perkembangan daerah miskin yang dinamakan efek penyebaran (*spread effect*) yang timbul akibat pertambahan permintaan dari daerah kaya terhadap produksi daerah miskin. Sebab utama ketimpangan wilayah di negara-negara terbelakang adalah kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar.

Pada intinya, teori-teori mengenai ketimpangan antar wilayah tersebut mengemukakan adanya aliran tenaga kerja, barang dan jasa yang tidak seimbang dari wilayah yang kurang maju, dalam pengertian bahwa aliran-aliran tersebut tidak diimbangi oleh keuntungan yang seharusnya juga dinikmati wilayah yang kurang maju. Kesenjangan yang terjadi ini dapat semakin besar karena proses pembangunan hampir selalu dimulai di wilayah-wilayah maju yang telah memiliki daya tarik wilayah, seperti ketersediaan infrastruktur, pasar, dukungan finansial, fasilitas transportasi dan lain sebagainya.

Menurut Rondinelli, tingkat perkembangan wilayah dapat dilihat secara sederhana dalam tiga indikator, yaitu:

1. Aspek sosial ekonomi dan demografi diukur melalui pendapatan perkapita, kebutuhan fisik minimum, produk domestik regional bruto, investasi, jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, jumlah usia harapan hidup, tingkat kematian bayi perkapita, dan jumlah fasilitas kesehatan.
2. Kontribusi produksi pertanian dan industri diukur melalui persentase penyerapan tenaga kerja, jumlah perusahaan komersial, luas total lahan pertanian dan produktivitas pertanian, luas lahan sawah, dan luas lahan pertanian untuk hidup layak.
3. Aksesibilitas diukur melalui sambungan telepon, tipe jalan, dan panjang jalan.

1.5.5 Penelitian Sebelumnya

Nugroho Adi Prabowo dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah di Subwilayah Pembanguna (SWP) I Kabupaten Boyolali Jawa Tengah ” bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ketersediaan fasilitas sosial ekonomi dengan perkembangan wilayah, mengetahui hubungan antara daya layan fasilitas sosial ekonomi dengan tingkat perkembangan wilayah di di Subwilayah Pembanguna (SWP) I Kabupaten Boyolali serta mengetahui tingkat perkembangan wilayah di Subwilayah Pembangunan (SWP) I Kabupaten Boyolali.

Variabel-variabel yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, berupa jumlah penduduk, fasilitas pendidikan (SD-SMA), fasilitas kesehatan (ketersediaan rumah sakit, puskesmas, rumah bersalin, puskesmas pembantu, poliklinik, dan jumlah BKIA), fasilitas perdagangan dan jasa, metode penelitian yang digunakan adalah analisis data sekunder yang menekankan pada survei instansional, dengan pendekatan analisis kuantitatif, analisis korelasi, analisis peta, analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara umum distribusi fasilitas sosial ekonomi tersebar merata pada subwilayah pembangunan (SWP) 1 Kabupaten Boyolali.

Tri Murtopo dalam penelitiannya yang berjudul “Kajian Tingkat Perkembangan Wilayah untuk penentuan Prioritas Pengembangan di Kabupaten Boyolali Jawa Tengah” yang bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan wilayah dan menetapkan prioritas pengembangan dalam kontek untuk mengurangi kesenjangan antar kecamatan di boyolali, menggunakan metode Penelitian Analisis data sekunder dengan mengolah data tahun 2002 dan 2006. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kepadatan penduduk, PDRB perkapita, Fasilitas Perdagangan, fasilitas kesehatan, dan kepadatan jalan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pola perkembangan wilayah Kabupaten Boyolali untuk tingkat perkembangan rendah, sedang, dan tinggi pada tahun 2006 yaitu memiliki pola cenderung seragam (*uniform*), cenderung acak (*random*), dan mendekati seragam (*uniform*). Penentuan prioritas pengembangan dilakukan dengan dua analisis yang pertama yaitu dengan

menggunakan analisa komparatif nilai potensi sosio demografi, kontribusi tenaga kerja di sektor industri dan aksesibilitas wilayah Tahun 2002 dan 2006. Kedua yaitu penentuan prioritas pengembangan dengan analisa Uji Tanda.

Tabel 1.7 Perbandingan Penelitian Sebelumnya

Peneliti	Nugroho Adi Prabowo (2005)	Tri Murtopo (2009)	Novie Anggraeni (2013)
Judul	Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah di Subwilayah Pembanguna (SWP) I Kabupaten Boyolali Jawa Tengah	Kajian Tingkat Perkembangan Wilayah untuk penentuan Prioritas Pengembangan di Kabupaten Boyolali Jawa Tengah	Analisis Disparitas Perkembangan Wilayah antar Fungsi Pusat Pelayanan dalam RTRW di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah tahun 2002 dan 2011.
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui hubungan antara ketersediaan fasilitas sosial ekonomi dengan perkembangan wilayah. 2. Mengetahui hubungan antara daya layan fasilitas sosial ekonomi dengan tingkat perkembangan wilayah di di Subwilayah Pembanguna (SWP) I Kabupaten Boyolali. 3. Mengetahui tingkat perkembangan wilayah di Subwilayah Pembangunan (SWP) I Kabupaten Boyolali. 	Bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan wilayah dan menetapkan prioritas pengembangan dalam kontek untuk mengurangi kesenjangan antar kecamatan di boyolali.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui perkembangan wilayah antar Fungsi Pusat Pelayanan di Kabupaten Boyolali. 2. Bagaimana disparitas perkembangan wilayah antar Fungsi Pusat Pelayanan di Kabupaten Boyolali. 3. Mengetahui faktor yang dominan mempengaruhi ketimpangan perkembangan wilayah di Kabupaten Boyolali.
Metode	Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data sekunder yang menekankan pada survei instansional, dengan pendekatan analisis kuantitatif, analisis korelasi, analisis peta, analisis deskriptif kualitatif	Metode Penelitian yang digunakan adalah Analisis data sekunder dengan mengolah data tahun 2002 dan 2006	Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis data sekunder Kabupaten Boyolali. Dengan metode skoring untuk menentukan klasifikasi perkembangan wilayah dan, Menghitung disparitas perkembangan wilayah dengan analisis Indeks Wiliamson. Serta analisis Regresi berganda untuk menentukan variabel yang dominan berpengaruh terhadap perkembangan wilayah

<p>Hasil</p>	<p>1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara umum distribusi fasilitas sosial ekonomi tersebar merata pada subwilayah pembanguna (SWP) 1 Kabupaten Boyolali.</p> <p>2. Pemilihan wilayah prioritas pengembangan di ini didasarkan atas tingkat perkembangan potensi dan permasalahan yang dihadapi masing-masing wilayah.</p>	<p>1. Pola perkembangan wilayah Kabupaten Boyolali pada tahun 2006 yaitu memiliki pola cenderung seragam (<i>uniform</i>), cenderung acak (<i>random</i>), dan mendekati seragam (<i>uniform</i>).</p> <p>2. Penentuan prioritas pengembangan dengan analisis Komparatif mendapatkan hasil sebagai berikut : Prioritas I (jangka pendek) adalah Kecamatan Ampel, Banyudono, dan Kemusu. Prioritas II (menengah) yaitu Kecamatan Andong, Selo, Cepogo, Teras, Mojosongo, Sambu, Simo, Nogosari, Karanggede, Musuk, Ngemplak, Boyolali, Klego, dan Wonosegoro. Prioritas III (panjang) yaitu Kecamatan Sawit dan Juwangi.</p> <p>3. Penentuan prioritas perkembangan dengan uji ganda mendapatkan hasil sebagai berikut: fasilitas toko prioritas I: Selo, Ampel, Cepogo, Musuk, Mojosongo, Simo dan Andong. Prioritas II: Boyolali, Teras, Sawit, Sambu, Ngemplak, Nogosari, Kemusu, Wonosegoro dan Juwangi. Fasilitas Pasar Prioritas I: Musuk dan Teras. Prioritas II: Selo, Ampel, Mojosongo, Sambu dan Nogosari. Fasilitas TK priorita II: Kecamtan</p>	<p>di Kabupaten Boyolali.</p> <p>1. Tingkat perkembangan wilayah berdasarkan kecamatan di Kabupaten Boyolali dari tahun 2002 dan 2011 terbagi menjadi 3 klasifikasi yaitu perkembangan wilayah naik, tetap, dan turun. Untuk perkembangan wilayah yang “naik” meliputi Kecamatan Ampel, Karanggede, Sambu, dan Wonosegoro. Untuk perkembangan wilayah yang “tetap” meliputi Kecamatan Boyolali, Mojosongo, Banyudono, Teras, Simo, Ngemplak, Selo, Cepogo, Musuk, Sawit, Nogosari, Klego, Andong, dan Kemusu. Sedangkan untuk perkembangan wilayah yang “turun” hanya Kecamatan Juwangi. berdasarkan Fungsi Pusat Pelayanan, perkembangan wilayah tidak meningkat ataupun tidak mengalami penurunan, sehingga dengan kata lain perkembangan wilayah “tetap” .</p> <p>2. Hasil penghitungan dengan indeks williamson untuk mengetahui Ketimpangan perkembangan wilayah di kabupaten Boyolali secara keseluruhan termasuk dalam klasifikasi tinggi dengan nilai IW 0,94 pada tahun 2002 dan</p>
---------------------	---	--	---

		<p>Musuk dan Ngemplak, Prioritas III: Selo, Ampel, Cepogo, Boyolali, Mojosongo, Teras, Sawit, Banyudono, Sambu, Nogosari, Simo, Karanggede, Klego, Andong, Kemusu, Wonosegoro dan Juwangi. SLTP semua termasuk prioritas ke II kecuali Simo. SMA prioritas I: Nogosari dan Klego, Prioritas II: Boyolali, Mojosongo, Teras, Banyudono, Ngemplak, Kemusu dan Wonosegoro., Sedangkan prioritas III: Cepogo, Sawit, Sambu, Simo, Karanggede, Klego, Andong dan Juwangi. Fasilitas Puskesmas termasuk Prioritas I: Kecamatan Mojosongo dan Wonosegoro. Puskesmas Pembantu prioritas I: Boyolali, Banyudono, dan Ngemplak. Prioritas II: Ampel, Cepogo, Musuk, Nogosari, Simo, Karanggede, Klego, dan Wonosegoro. Prioritas III: Selo, Mojosongo, Teras, Sawit, dan Andong. Tempat praktek dokter prioritas I: Ampel, Cepogo, Musuk, Boyolali, Mojosongo, Teras, Sawit, Banyudono, Sambu, Ngemplak, Nogosari, Simo, Karanggede, Andong, Kemusu dan Juwangi. Prioritas II: Selo, Klego dan Wonosegoro.</p>	<p>meningkat pada tahun 2011 menjadi 1,52. Disparitas perkembangan wilayah antar fungsi pusat pelayanan untuk PKW, PKLp, dan PPL mengalami peningkatan sedangkan untuk PKL dan PPK mengalami penurunan. Sedangkan disparitas berdasarkan Kecamatan yang tertinggi berada di Kecamatan Teras pada tahun 2002 dan Sawit pada tahun 2011.</p> <p>3. Hasil dari pengujian data dengan menggunakan Regresi Linier Berganda secara keseluruhan membuktikan bahwa variabel yang paling mempengaruhi perkembangan wilayah di Kabupaten Boyolali adalah variabel Fasilitas Kesehatan pada tahun 2002. Sedangkan pada tahun 2011 variabel yang paling berpengaruh terhadap perkembangan wilayah adalah variabel PDRB Perkapita. Dengan teknik pengujian yang sama namun dengan mengetahui indikator yang paling berpengaruh terhadap perkembangan wilayah adalah indikator fasilitas publik baik pada tahun 2002 dan 2011.</p>
--	--	--	--

1.6 Kerangka Penelitian

Memperhatikan berbagai uraian masalah mengenai wilayah terutama mengenai kesenjangan wilayah yang terjadi ini dapat semakin besar karena proses pembangunan hampir selalu dimulai di wilayah-wilayah maju yang telah memiliki daya tarik wilayah, seperti ketersediaan infrastruktur, pasar, dukungan finansial, fasilitas transportasi dan lain sebagainya. Pembangunan dan perkembangan wilayah sangat dipengaruhi oleh masalah-masalah kependudukan yang terjadi di suatu wilayah. Dilema yang sering dihadapi dalam kaitan antara penduduk dan perkembangan suatu wilayah adalah di satu pihak penduduk merupakan salah satu modal utama yang vital bagi kelanjutan pembangunan suatu wilayah.

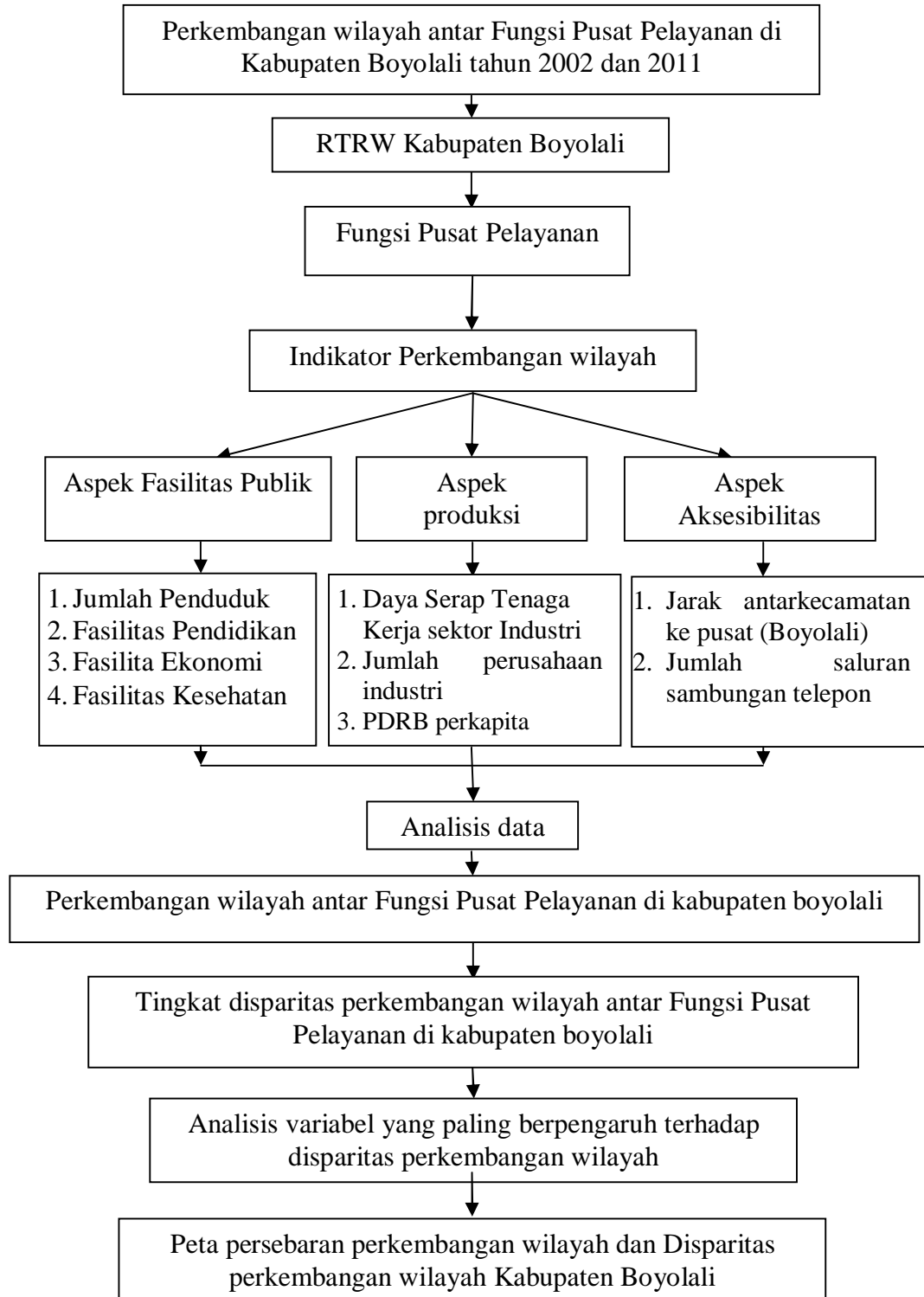
Pertambahan penduduk yang terlampau pesat merupakan salah satu hambatan utama dalam mengadakan percepatan dalam pembangunan ekonomi terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Sementara itu konsentrasinya penduduk di suatu wilayah tertentu juga membawa masalah tersendiri sebab hal tersebut akan berarti pula besarnya tuntutan terhadap kebutuhan pokok, seperti pangan, sandang, perumahan, lapangan kerja dan fasilitas lain (Muta'ali, 2011).

Kurangnya ketersediaan sarana dan fasilitas pelayanan dan kurangnya keterjangkauan pelayanan dari pusat pelayanan menuju wilayah yang dilayani merupakan masalah dalam perkembangan wilayah. Tingkat perkembangan wilayah sendiri merupakan ukuran peringkat secara relatif yang menyatakan kemajuan yang di capai wilayah sebagai hasil aktivitas pembangunan dibandingkan dengan wilayah lain.

Sehingga tahapan kerangka pemikiran dari Penelitian ini yang akan dilaksanakan di Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut: (1) mengidentifikasi masalah-masalah kewilayahan di Kabupaten Boyolali, (2) mengidentifikasi ketersediaan dan persebaran fasilitas-fasilitas dari aspek Fasilitas publik, aspek produksi, dan Aspek aksesibilitas. (3) mengumpulkan data-data mengenai fasilitas-fasilitas pelayanan dan demografi tersebut, yaitu berupa data fasilitas pendidikan, kesehatan, perekonomian, data kepadatan penduduk, PDRB

perkapita, jumlah tenaga kerja di bidang industri, jumlah perusahaan, jarak kepusat pemerintahan dan jumlah saluran sambungan telepon di Kabupaten Boyolali. (4) Untuk mengetahui tingkat perkembangan wilayah dengan melakukan pengolahan data-data yang telah terkumpul tersebut dengan menggunakan teknik skoring. (5) langkah selanjutnya adalah menghitung besaran disparitas antar fungsi Pusat Pelayanan di kabupaten boyolali dengan menggunakan data PDRB perkapita dan jumlah penduduk serta penghitungan dengan menggunakan Indeks Williamson. (6) Dari hasil pengolahan data yang telah di olah tersebut selanjutnya dianalisis keterkaitan tingkat perkembangan wilayah dengan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah, serta untuk mengetahui variabel yang paling mempengaruhi perkembangan wilayah dengan menggunakan uji regresi berganda. (6) melakukan pemetaan digital dari hasil analisis data.

Untuk lebih mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, kerangka penelitian dapat dilihat dalam gambar 1.2 diagram alir penelitian berikut:



Sumber: Penulis, 2014

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis data sekunder yaitu mengolah data-data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) tahun 2002 dan 2011.

1.7.1 Pemilihan Daerah Penelitian

Dalam penelitian ini di pilih Kabupaten Boyolali sebagai daerah penelitian dengan pertimbangan :

1. Perkembangan Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Boyolali menarik untuk di kaji karena ketimpangan perkembangan wilayah di Kabupaten Boyolali yang tidak merata.
2. Mengetahui perkembangan wilayah antar Fungsi Pusat Pelayanan dalam RTRW Kabupaten Boyolali.

1.7.2 Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Boyolali. Data tersebut antara lain sebagai alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Peta yang digunakan meliputi:
Peta administrasi Kabupaten Boyolali
- b. Data yang digunakan diperlukan meliputi:
 - 1) Data kependudukan (jumlah penduduk) tahun 2002 dan 2011
 - 2) Data fasilitas pendidikan (ketersediaan fasilitas SD,SMP, dan SMA) tahun 2002 dan 2011
 - 3) Data fasilitas Kesehatan tahun 2002 dan 2011
 - 4) Data fasilitas perekonomian (ketersediaan pasar, bank) tahun 2002 dan 2011
 - 5) Data PDRB perkapita tahun 2002 dan 2011
 - 6) Jumlah perusahaan industri tahun 2002 dan 2011
 - 7) Daya serap tenaga kerja sektor industri tahun 2002 dan 2011

- 8) Jumlah sambungan saluran telepon tahun 2002 dan 2011
- 9) Jarak tiap kecamatan ke pusat (Boyolali) tahun 2002 dan 2011

1.7.3 Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian merupakan suatu usaha peneliti yang dilakukan agar tujuan penelitian dapat tercapai, yaitu meliputi:

a. Tahap persiapan, dalam penelitian ini meliputi:

1) Studi pustaka

Yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari literatur, referensi baik dari buku, majalah, laporan penelitian, maupun jurnal yang terkait dengan tema penelitian

2) Studi Peta

Merupakan usaha untuk mempelajari peta-peta daerah penelitian yang nantinya digunakan untuk menyiapkan peta dasar serta untuk menyiapkan peta hasil penelitian

b. Tahap pelaksanaan

Tahap ini adalah tahapan yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian yaitu berupa data sekunder. Data-data tersebut di peroleh dari instansi-instansi terkait. Variabel penelitian meliputi:

1) Variabel pengaruh, yaitu:

- a) Data fasilitas pendidikan (ketersediaan fasilitas TK, SD, SMP, dan SMA)
- b) Data fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Praktek dokter)
- c) Data fasilitas perdagangan dan jasa (ketersediaan pasar, dan toko)
- d) Data PDRB perkapita
- e) Jumlah perusahaan sektor industri
- f) Daya serap tenaga kerja sektor industri
- g) Jumlah sambungan saluran telepon
- h) Jarak tiap kecamatan ke pusat (Boyolali)

2) Variabel terpengaruh, yaitu tingkat perkembangan wilayah

c. Tahap Analisis data,

Tahap ini menggunakan analisis sebagai berikut:

1) Analisis kuantitatif

Merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui ketersediaan fasilitas sosial ekonomi, produksi bidang industri serta aksesibilitas wilayah.

Penilaian meliputi:

a) Penilaian tingkat perkembangan wilayah.

Dalam mengukur tingkat perkembangan wilayah dapat digunakan dengan menggunakan beberapa indikator, antara lain:

- (1) Aspek Fasilitas Publik diukur melalui jumlah fasilitas pendidikan, jumlah fasilitas kesehatan, jumlah fasilitas ekonomi
- (2) Kontribusi produksi industri diukur melalui jumlah perusahaan di sektor industri, jumlah tenaga kerja di sektor industri dan PDRB Perkapita
- (3) Aksesibilitas diukur melalui jarak tiap kecamatan ke pusat (Boyolali) dan jumlah sambungan saluran telepon.

Indikator tersebut disajikan dalam tabel 1.8 Berikut:

Indikator	Variabel	Asumsi
Fasilitas Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah fasilitas pendidikan - Jumlah fasilitas kesehatan - Jumlah fasilitas ekonomi (pasar, bank) 	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin banyak fasilitas pendidikan maka perkembangan wilayah semakin tinggi - Semakin banyak fasilitas kesehatan maka taraf hidup masyarakat semakin baik sehingga perkembangan wilayah semakin tinggi. - Semakin banyak fasilitas ekonomi maka arus perputaran uang dan barang semakin baik serta perkembangan wilayah semakin baik.
Kontribusi produksi industri	<ul style="list-style-type: none"> - Daya serap tenaga kerja di sektor industri - Jumlah perusahaan di sektor industri - PDRB perkapita 	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin tinggi daya serap tenagakerja di bidang industri maka perkembangan wilayah semakin tinggi - Semakin tinggi jumlah perusahaan di sektor industri maka perkembangan wilayah semakin tinggi. - Semakin tinggi PDRB perkapita maka semakin baik tingkat perkembangan wilayah
Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> - jarak antar kecamatan ke pusat (Boyolali) - Sambungan telepon 	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin dekat dengan pusat (Boyolali) maka perkembangan wilayah semakin tinggi - Semakin banyak sambungan telepon yang di pasang maka tingkat perkembangan wilayah semakin tinggi

Sumber : Penulis, 2013

Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat perkembangan wilayah di dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada pendapatan namun tidak semua indikator digunakan dalam penelitian ini karena keadaan realistis di daerah penelitian yang belum memungkinkan indikator yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Indikator Fasilitas Publik, yang terdiri dari:
 - a. Ketersediaan fasilitas sosial ekonomi

Tabel 1.9
Standar Fasilitas Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Standar daya layan
1	TK	1.250 Penduduk tiap 1 unit
2	SD	1.600 Penduduk tiap 1 unit
3	SMP	4.800 Penduduk tiap 1 unit
4	SMA	4.800 Penduduk tiap 1 unit

Sumber: SNI 03-1733-2004 (dalam Muta'ali, 2012)

Tabel 1.10
Standar Fasilitas Kesehatan

No	Tingkat pendidikan	Standar daya layan
1	Rumah Sakit	120.000 Penduduk tiap 1 unit
2	Puskesmas	120.000 Penduduk tiap 1 unit
3	Puskesmas Pembantu	30.000 Penduduk tiap 1 unit
4	Tempat Praktek Dokter	5.000 Penduduk tiap 1 unit

Sumber: SNI 03-1733-2004 (dalam Muta'ali, 2012)

Tabel 1.11
Standar Fasilitas ekonomi

No	Tingkat pendidikan	Standar daya layan
1	Pasar	30.000 Penduduk tiap 1 unit
2	Toko	250 Penduduk tiap 1 unit

Sumber: SNI 03-1733-2004 (dalam Muta'ali, 2012)

2. Indikator kontribusi Industri yaitu daya serap tenaga kerja, jumlah perusahaan di sektor industri dan PDRB Perkapita
3. Indikator aksesibilitas yaitu jarak antar kecamatan ke pusat (Boyolali) dan sambungan Telepon

Analisa data yang digunakan untuk mengetahui perkembangan wilayah adalah dengan menggunakan teknik skoring. Sebelum melakukan skoring langkah yang paling penting yang harus dilakukan adalah memberikan asumsi terhadap indikator-indikator yang telah dipilih. Bahwa untuk melihat distribusi perkembangan wilayah dengan

melihat perbedaan total skor keseluruhan indikator-indikator yang ada. Adapun untuk menentukan prioritas penanganan berdasarkan skor total terendah dan dilihat pada indikator terendahnya. Penelitian ini menentukan tiga kelas dimana untuk menentukan interval kelas digunakan rumus Sturgess sebagai berikut.

$$interval = \frac{Nilai Maks - Nilai Min}{Kelas}$$

Dimana :

Maks : Nilai tertinggi

Min : Nilai terendah

Kelas : Jumlah kelas yang diinginkan

Teknik Skoring Tingkat Perkembangan Wilayah

1. Indikator Fasilitas Publik

a. Ketersediaan Fasilitas pendidikan

Tabel 1.12

Klasifikasi Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendidikan

Klasifikasi TK	skor	Bobot	Nilai
Rendah	1	1	1
Sedang	2	1	2
Tinggi	3	1	3
Klasifikasi SD	skor	Bobot	Nilai
Rendah	1	2	2
Sedang	2	2	4
Tinggi	3	2	6
Klasifikasi SMP	skor	Bobot	Nilai
Rendah	1	3	3
Sedang	2	3	6
Tinggi	3	3	9
Klasifikasi SMA	skor	Bobot	Nilai
Rendah	1	4	4
Sedang	2	4	8
Tinggi	3	4	12

Sumber : penulis 2014

b. Ketersediaan Fasilitas kesehatan

Tabel 1.13

Klasifikasi Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Klasifikasi RS	Skor	Bobot	Nilai
Rendah	1	4	4
Sedang	2	4	8
Tinggi	3	4	12
Klasifikasi puskesmas	Skor	Bobot	Nilai
Rendah	1	3	3
Sedang	2	3	6
Tinggi	3	3	9
Klasifikasi puskesmas pembantu	Skor	Bobot	Nilai
Rendah	1	2	2
Sedang	2	2	4
Tinggi	3	2	6
Klasifikasi tempat praktek dokter	Skor	Bobot	Nilai
Rendah	1	1	1
Sedang	2	1	2
Tinggi	3	1	3

Sumber : penulis 2014

c. Ketersediaan Fasilitas Ekonomi

Tabel 1.14

Klasifikasi Tingkat Ketersediaan Fasilitas Ekonomi

Klasifikasi Pasar	skor	Bobot	Nilai
Rendah	1	2	2
Sedang	2	2	4
Tinggi	3	2	6
Klasifikasi Toko	skor	Bobot	Nilai
Rendah	1	1	1
Sedang	2	1	2
Tinggi	3	1	3

Sumber : penulis 2014

2. Indikator produksi

- a. Serapan tenaga kerja dalam sektor industri

Tabel 1.15

Klasifikasi Jumlah Daya Serap Tenaga Kerja dalam sektor Industri

Klasifikasi tenaga kerja	skor	Bobot	Nilai
Rendah	1	1	1
Sedang	2	1	2
Tinggi	3	1	3

Sumber : penulis 2014

- b. Jumlah perusahaan di sektor Industri

Tabel 1.16

Klasifikasi Jumlah Perusahaan di Sektor Industri

Klasifikasi perusahaan	jumlah	skor	Bobot	Nilai
Rendah		1	1	1
Sedang		2	1	2
Tinggi		3	1	3

Sumber : penulis 2014

- c. PDRB perkapita

Tabel 1.17

Klasifikasi Tingkat PDRB perkapita

Klasifikasi PDRB	skor	Bobot	Nilai
Rendah	1	1	1
Sedang	2	1	2
Tinggi	3	1	3

Sumber : penulis 2014

3. Indikator Aksesibilitas

Tabel 1.18

Klasifikasi jarak tiap kecamatan ke pusat (Boyolali)

Klasifikasi jarak	skor	Bobot	Nilai
Rendah	1	1	1
Sedang	2	1	2
Tinggi	3	1	3

Sumber : penulis 2014

Tabel 1.19

Klasifikasi saluran sambungan telepon

Klasifikasi saluran sambungan telepon	Skor	Bobot	Nilai
Rendah	1	1	1
Sedang	2	1	2
Tinggi	3	1	3

Sumber : penulis 2014

Setelah di lakukan analisis dengan teknik skoring maka dapat ditentukan klasifikasi tingkat potensi fasilitas publik, kontribusi produksi dan aksesibilitas wilayah. Dari indikator-indikator tersebut ditentukan nilai komposit, setelah ditentukan nilai kompositnya dilakukan pengklasifikasian dengan rumus sturges dari nilai komposit tersebut dengan pengklasifikasian tinggi, rendah, sedang pada tahun 2002 dan tahun 2011. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat perkembangan wilayah yaitu dengan melihat hasil klasifikasi dari nilai komposit tahun 2002 dan 2011, sehingga dapat diketahui perkembangan wilayah tahun 2002 dan 2011.

b) Penilaian tingkat disparitas Kabupaten Boyolali

Dalam penilaian tingkat disparitas Kabupaten Boyolali yaitu dengan menggunakan Indeks Williamson (dalam Rustiadi, 2008) yaitu sebagai berikut:

$$Iw = \frac{\sqrt{\sum(Yi - Y)^2 fi/n}}{Y}$$

Dimana :

Iw = Indeks Kesenjangan wilayah (Iw)

Fi = jumlah penduduk di kecamatan wilayah ke- i

n = jumlah penduduk Kabupaten

Yi = PDRB per kapita kecamatan wilayah ke- i

Y = rata- rata PDRB perkapita Kabupaten

Dengan ketentuan sebagai berikut:

$IW < 0,4$ = artinya tingkat ketimpangan rendah

$0,4 < IW < 0,5$ = artinya tingkat ketimpangan sedang

$IW > 0,5$ = artinya tingkat ketimpangan tinggi

Indeks Wiliamson akan menghasilkan indeks yang lebih besar atau sama dengan nol. Jika semua $Y_i = Y$ maka akan dihasilkan indeks = 0, yang berarti tidak adanya kesenjangan ekonomi antar daerah. Indeks lebih besar dari 0 menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi antar daerah. Semakin besar indeks yang dihasilkan semakin besar tingkat kesenjangan.

c) Mengetahui Faktor yang Dominan berpengaruh Perkembangan Wilayah

Untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap perkembangan wilayah. Peneliti menggunakan analisis statistik dengan menggunakan spss 17 yaitu menggunakan uji regresi berganda. Uji regresi berganda adalah alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat (dalam Yamin,2011). Berikut persamaan regresi berganda:

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Keterangan :

Y' = Variabel Dependen (Nilai yang diprediksikan)

X_1 dan X_2 = Variabel Independen

a = Konstanta

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

1.8 Batasan Operasional

Wilayah merupakan Suatu area yang memiliki arti (*meaningful*), karena adanya masalah-masalah yang ada di dalamnya, khususnya masalah yang menyangkut sosial-ekonomi. (wilayah bukan sekedar areal dengan batas-batas tertentu) (Isard, 1975).

Disparitas wilayah ditunjukkan dengan perbedaan tingkat pendapatan perkapita antara satu wilayah relatif terhadap wilayah lain (Muta'ali, 2011)

Perkembangan adalah suatu usaha-usaha tertentu mengubah kondisi yang ada menjadi suatu kondisi lebih baik.

Pembangunan adalah usaha sadar dan berencana untuk meningkatkan mutu hidup yang dalam pelaksanaannya akan selalu menggunakan dan mengelola sumberdaya baik sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan (Sugeng Martopo, 1984)

Perencanaan adalah suatu cara berfikir utama tentang masalah sosial dan ekonomi, yang mengacu pada masa depan, dengan memperhatikan secara mendalam yang berkaitan dengan tujuan-tujuan untuk mengumpulkan pilihan-pilihan dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengkomprehensifikannya dalam kebijakan dan program (Jhon Friedman, 1988)

Fasilitas sosial adalah segala fasilitas pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun non pemerintah yang mempengaruhi langsung ataupun pengaruh nyata menurut fungsi sosial dari pelayanan tersebut kepada penggunanya.

Tingkat perkembangan wilayah adalah ukuran rangking secara relative yang menyatakan kemajuan yang dicapai oleh suatu wilayah sebagai hasil aktivitas pembangunan dibandingkan dengan wilayah lainnya (Hadi Sabari Yunus, 1991).